

KAJIAN KELAYAKAN KECAMATAN SALAHUTU SEBAGAI CALON IBU KOTA KABUPATEN KEPULAUAN AMBON

Usman Gumanti Layn¹, Adnan Affan Akbar Botanri², Pieter Th. Berhиту³

^{1, 2, 3}Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, Maluku, Indonesia

Email: usmanlayn23@gmail.com

Article History

Received: 12-02-2024

Revision: 12-04-2024

Accepted: 27-04-2024

Published: 30-04-2024

Abstract. The issue of territorial expansion that has been discussed in Maluku is about the division of Leihitu and Salahutu sub-districts into a new regency named Ambon Islands Regency. Problems that occur such as the difficulty of administrative management such as identity cards, the lack of supporting facilities for settlement activities, the distance between the sub-district control and the Regency Capital, and various other problems that occur. The purpose of this study is to determine the feasibility of Salahutu District to become a candidate for the New Autonomous Region of the Ambon Islands Regency as well as a suitable location to become the center of its capital city. This research uses qualitative methods with data collection techniques through direct surveys. The analysis used is human development index analysis, land suitability analysis and population density analysis. The results obtained are the human development index in Salahutu District, which is 61.99, which means that the category is medium / middle to upper. Then for the cultivation area, there are 14,409 ha or 98.94% of the total area of Salahutu District, so there is still plenty of room for construction and development of infrastructure and facilities. For the center of the capital city, the results were obtained that Tulehu State became a priority or the top choice because it had the highest density level of 10.44 people / ha. The importance of the results of this research is as a basis for the expansion of new sub-districts in Central Maluku Regency based on problems that have occurred to create plans that are beneficial to the community.

Keywords: New Autonomous Region, Salahutu District

Abstrak. Isu pemekaran wilayah yang pernah dibahas di Maluku yaitu tentang pemekaran wilayah kecamatan Leihitu dan Salahutu menjadi satu Kabupaten baru yang diberi nama Kabupaten Kepulauan Ambon. Permasalahan yang terjadi seperti sulitnya pengurusan administrasi seperti kartu tanda penduduk, minimnya prasarana-sarana pendukung aktivitas permukiman, jauhnya rentang kendali kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten, serta berbagai permasalahan yang terjadi lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan Kecamatan Salahutu untuk menjadi calon Daerah Otonomi Baru dari Kabupaten Kepulauan Ambon serta lokasi yang sesuai untuk menjadi pusat Ibu Kotanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei secara langsung. Analisis yang digunakan yakni analisis indeks pembangunan manusia, analisis kesesuaian lahan dan analisis kepadatan penduduk. Hasil yang didapatkan yakni indeks pembangunan manusia di Kecamatan Salahutu yakni 61,99 yang artinya kategorinya sedang/menengah ke atas. Kemudian untuk kawasan budidaya, tersedia sebanyak 14.409 ha atau 98,94% dari total luas wilayah Kecamatan Salahutu, sehingga masih tersedia banyak ruang untuk dilakukan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana. Untuk pusat Ibu Kota didapatkan hasil yakni Negeri Tulehu menjadi prioritas atau pilihan utama karena memiliki tingkat kepadatan yang paling tinggi yakni 10,44 jiwa/ha. Pentingnya hasil penelitian ini ialah sebagai dasar pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan permasalahan yang telah terjadi agar dapat tercipta perencanaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru, Kecamatan Salahutu

How to Cite: Layn, U. G., Botanri, A. A. A., & Berhиту, P. T. (2024). Kajian Kelayakan Kecamatan Salahutu Sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Ambon. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2 (1), 11-18. <http://doi.org/10.54373/hijm.v2i1.992>

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi yang seluas-luasnya. Tata pemerintahan yang baik merupakan misi setiap daerah yang sangat didambakan oleh para stakeholder pada suatu daerah. Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia menjadi isu sejak tahun 1990-an dengan terbentuknya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah semakin menguatkan posisi kekuasaan yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Saat ini telah diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang pada umumnya penetapan atau penetapan atau pemindahan ibu kota adalah hal biasa terjadi diberbagai daerah dan Negara.

Fakta menunjukan bahwa penetapan atau pemindahan Ibu kota seringkali mengalami kesalahan pemaknaan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan karena kurang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, seperti aspek sosial, ekonomi, keuangan dan kemampuan bertahan dalam perkembangannya, sehingga menyebabkan kontra-produktif terhadap otonomi daerah (Hasyim, 2010). Isu pemekaran wilayah yang pernah dibahas di Maluku yaitu tentang pemekaran wilayah Kecataman Leihitu dan Kecamatan Salahutu menjadi satu Kabupaten Baru yang diberi nama Kabupaten Kepulauan Ambon. Isu pemekaran wilayah ini dilontarkan oleh Walikota Ambon Richard Louhanaepssy sebagai dampak dari pembangunan strategis nasional, Ambon New Port yang direncanakan dikawasan Kecamatan Salahutu (Terasmaluku, 2021). Selain itu masalah pelayanan administrasi kependudukan di wilayah yang bercirikan kepulauan seperti di Kabupaten Maluku Tengah, menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapat layanan pengurusan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya (Alfons, 2024).

Berdasarkan hal tersebut lokasi wilayah Kecamatan Salahutu yang terletak di Pulau Ambon, sangat jauh keberadaannya jika dihubungkan dengan Pusat Pemerintahannya yakni Kota Masohi yang berada di Pulau Seram, sehinga terbentuknya isu pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Kepulauan Ambon maka tentunya memerlukan kajian untuk menentukan satu lokasi yang layak untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten yaitu pada Kecamatan Salahutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan Kecamatan Salahutu untuk menjadi calon Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Kabupaten Kepulauan Ambon serta lokasi yang sesuai untuk menjadi pusat Ibu Kotanya. Pentingnya melakukan perencanaan ini karena sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 bahwa Perencanaan Tata Ruang ialah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan

dan penetapan rencana tata ruang. Pola ruang bisa didapatkan dengan melakukan analisis kesesuaian lahan, sehingga antara tujuan dan analisis yang dilakukan saling terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu (Abdussamad, 2021). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Data yang diperlukan adalah data primer yang didapatkan dengan survei secara langsung di Kecamatan Salahutu dan data sekunder yang didapatkan dari informasi yang dibuat pihak lain seperti buku, artikel, peta, dll seperti Kecamatan Dalam Angka, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta dokumen lainnya. Penulis melakukan overlay dari beberapa parameter sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 837 tahun 1980. Parameter tersebut adalah kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Berikut adalah tabel parameter tersebut:

Tabel 1. Parameter kelerengan

Kelas	Kemiringan (%)	Klasifikasi	Nilai Skor
1	0 – 8	Datar	20
2	> 8 – 15	Landai	40
3	> 15 – 25	Agak Curam	60
4	> 25 – 45	Curam	80
5	> 45	Sangat Curam	10

Tabel 2. Parameter jenis tanah

Kelas	Jenis Tanah	Klasifikasi	Nilai Skor
1	Aluvial, Glei. Planosol, Hidromorf Kelabu, Literite Air Tanah	Tidak Peka	15
2	Latosol	Agak Peka	30
3	Brown Forest Soil, Non-Calcic	Kurang Peka	45
4	Andosol, Lateritic Gromusol, Podsolik	Peka	60
5	Regosol, Litosol Organosol, Renzine	Sangat Peka	75

Tabel 3. Parameter curah hujan

Kelas	Curah Hujan	Klasifikasi	Nilai Skor
1	8 - 13,6	Sangat Rendah	10
2	> 13,6 – 20,7	Rendah	20
3	> 20,7 – 27,7	Sedang	30
4	27,7 – 34,8	Tinggi	40
5	> 34,8	Sangat Tinggi	50

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah peta terkait Kecamatan Salahutu, diantaranya peta administrasi, peta bangunan, peta kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni Laptop dengan software ArcGIS 10.7. Teknik analisis yang digunakan yakni pemetaan kesesuaian lahan menggunakan hasil overlay

peta kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan, yang digunakan adalah metode SIG. Setelah dilakukan skoring terhadap ketiga parameter tersebut, selanjutnya dilakukan overlay sehingga menghasilkan peta fungsi kawasan yang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya (Botanri, 2021).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga yakni Analisis Indeks Pembangunan Manusia yakni untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Pakaya (2018), Indeks pembangunan manusia bisa diukur dengan menghitung tiga variabel yakni Indeks Harapan Hidup (*longevity*), Indeks Pengetahuan (*knowledge*), serta Indeks Standar Hidup Layak (*decent living*). Selain dengan dua analisis diatas, analisis terakhir yang digunakan yakni kepadatan penduduk untuk menentukan Desa atau Kelurahan atau Negeri mana yang paling layak untuk dijadikan Ibu Kota untuk DOB Kabupaten Kepulauan Ambon nantinya berdasarkan kepadatan yang paling tinggi di Kecamatan Salahutu.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Kecamatan Salahutu

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berada pada wilayah timur laut Pulau Ambon, keberadaan pada kawasan ini memiliki potensi perikanan, dan Pertanian tambak. Lebih dominannya bagian besar dari Kecamatan Salahutu adalah dataran yang saat ini sedang berkembang beberapa aktivitas pertanian dan sektor transportasi dikarenakan wilayah ini merupakan daerah transit untuk menuju ke beberapa pulau seperti Kailolo, Kota Masohi dan wilayah lainnya, serta terdapat beberapa wilayah yang mulai dikembangkan sebagai kawasan perikanan tangkap salah contohnya seperti pada Desa Tulehu. Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 6 Desa/Negeri yakni Tulehu, Waai, Liang, Suli, Tengah-Tengah dan Tial. Luas wilayah Kecamatan Salahutu adalah 151,082km² dengan batas administrasi Kecamatan Salahutu yakni sebelah utara berbatasan dengan Selat Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Baguala, sebelah timur berbatasan dengan Selat Haruku dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

Penggunaan lahan di Kecamatan Salahutu terdiri dari permukiman, hutan, perkebunan, hutan mangrove, savana/padang rumput, tanah terbuka, dan peruntukan lainnya. Penggunaan lahan di Kecamatan Salahutu sebagian besar adalah hutan yang masih dominan yakni sebesar 11.179 ha atau 76,76% dari total luas wilayah. Kondisi eksisting wilayah di Kecamatan Salahutu juga menunjukkan bahwa masih sedikitnya pembangunan hampir di setiap desa yang ada di Kecamatan Salahutu, hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan permukiman yang kecil yakni 1.090 ha atau 7,48% dari total luas kecamatan yakni sebesar 14.564 ha.

Karakteristik Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berada di wilayah calon daerah otonomi baru Kabupaten Kepulauan Ambon akan mempengaruhi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga perlu adanya gambaran terkait indeks pembangunan manusia agar dapat dibuat sebuah program perencanaan pembangunan yang baik. Indeks pembangunan manusia (IPM) pada Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Ambon sebagai berikut:

Indeks Harapan Hidup

Indeks harapan hidup didapat dengan menggunakan variabel Anak Lahir Hidup (ALH) dan rata-rata anak yang hidup (dari ALH), dan dibandingkan dengan pengelolaan hidup panjang (Standar hidup), berikut hasil perhitungannya:

$$\begin{aligned}\text{Indeks harapan hidup} &= \frac{\text{Angka harapan hidup} - \text{Nilai Minimum hidup panjang}}{\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai minimum hidup panjang}} \\ \text{Indeks harapan hidup} &= \frac{62,50 - 25}{85 - 25} \\ \text{Indeks harapan hidup} &= \frac{37,50}{60} \\ \text{Indeks harapan hidup} &= 0,625 \times 100 \\ \text{Indeks harapan hidup} &= 62,5 \%\end{aligned}$$

Indeks harapan hidup pada Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kecamatan Salahutu mencapai 62,5 %, angka tersebut dapat dikatakan sebagai kategori menengah ke bawah.

Indeks Pengetahuan

Indeks pengetahuan ini dapat dikatakan sebagai alat ukur tingkat pendidikan yang ada pada masyarakat Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kecamatan Salahutu, indeks pengetahuan ini dapat diukur melalui jumlah angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama pendidikan, penghitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Indeks Pengetahuan} &= \left(\frac{2}{3} \text{ Angka melek huruf}\right) + \left(\frac{1}{3} \text{ Indeks rata-rata lama sekolah}\right) \\ \text{Indeks Pengetahuan} &= \left(\frac{2}{3} \times 60,25\right) + \left(\frac{1}{3} \times 6,67\right) \\ \text{Indeks Pengetahuan} &= 40,16 + 2,223 \\ \text{Indeks Pengetahuan} &= 42,38\end{aligned}$$

Standar Hidup Layak

Standar hidup layak (*decent living*) menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kemampuan tingkat konsumsi barang dan jasa. Berikut perhitungannya:

Standart hidup layak = Tingkat pendapatan x 100

Standart hidup layak = Rp. 811.111 x 100

Standart hidup layak = 81,11

Dari ketiga perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia yang ada pada Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kecamatan Salahutu:

$$IPM = \frac{\text{indeks harapan hidup} + \text{indeks pengetahuan} + \text{standar hidup layak}}{3}$$

$$IPM = \frac{62,5 + 42,38 + 81,11}{3}$$

$$IPM = 61,99$$

Berdasarkan perhitungan yang sudah di atas maka selanjutnya adalah mengklasifikasikan kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Ambon, yang mana berdasarkan klasifikasi IPM Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu; Kategori IPM rendah ($IPM < 60$), Kategori IPM Sedang/Menengah ke atas ($60 < IPM < 70$), Kategori IPM Tinggi ($70 < IPM < 80$), Kategori IPM Sangat Tinggi ($IPM > 80$). Sehingga jika diklasifikasikan dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka IPM Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kecamatan Salahutu termasuk pada kategori sedang/menengah ke atas.

Kesesuaian Lahan

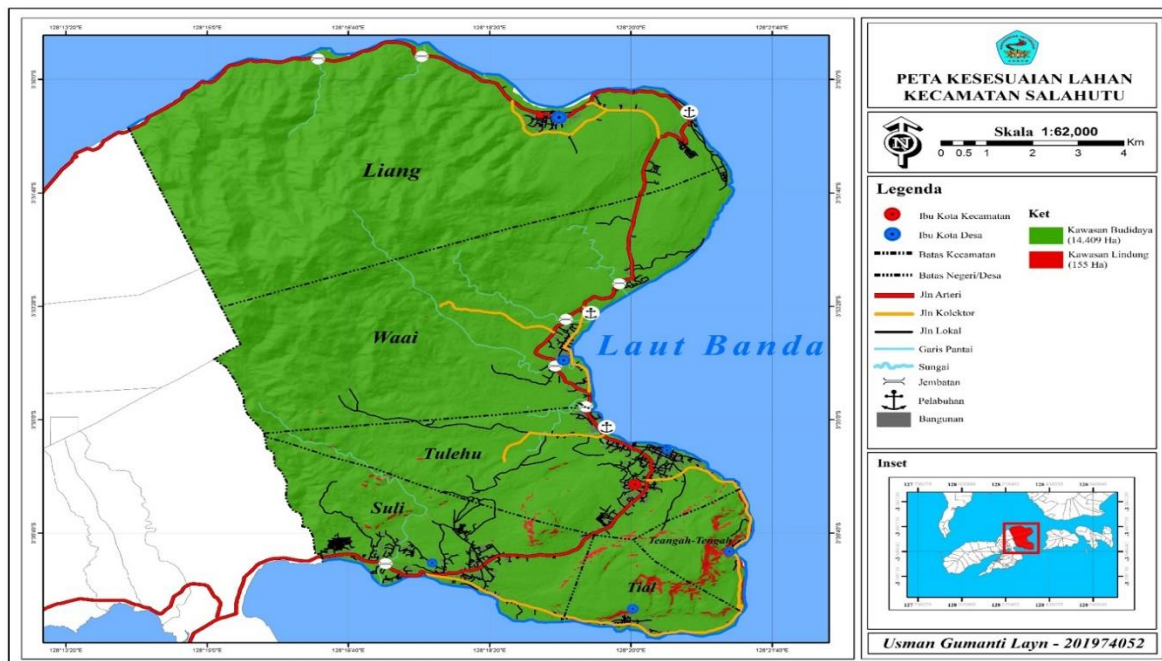
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya di luar kawasan lindung. Dengan menggunakan analisis ini, kita dapat mengetahui seberapa besar kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Kecamatan Salahutu.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis kesesuaian lahan dengan tiga parameter yakni kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan, didapatkan bahwa di Kecamatan Salahutu memiliki kawasan budidaya sebesar 14.409 ha atau 98,94% sedangkan kawasan lindung sebesar 155 ha atau 1,06% dari total luas wilayah Kecamatan Salahutu sebesar 14.564 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1. Peta Fungsi Kawasan.

Kepadatan Penduduk

Kepadatan merupakan salah satu faktor dalam menentukan wilayah alternatif sebagai Ibu Kota Kabupaten karena wilayah yang memiliki kepadatan lebih besar daripada wilayah lainnya akan menggambarkan bahwa wilayah tersebut sudah lebih berkembang sehingga menjadi dasar

bagi pemerintah untuk menentukan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Ambon (Kurniati, 2010). Kepadatan penduduk didapatkan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan wilayah yang memiliki kepadatan tertinggi yakni Negeri Tulehu dengan kepadatan sebesar 10,44 jiwa/ha dan wilayah yang kedua yakni Negeri Suli dengan kepadatan sebesar 6,77 jiwa/ha sehingga Negeri Tulehu menjadi prioritas untuk menjadi Ibu Kota DOB Kabupaten Kepulauan Ambon sedangkan Negeri Suli menjadi alternatif I.



Gambar 1. Peta fungsi kawasan Kecamatan Salahutu

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni yang pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Ambon yakni 61,99 yang artinya termasuk pada kategori sedang/menengah ke atas. Kemudian untuk ketersediaan kawasan budidaya yang nantinya akan dilakukan pembangunan di calon DOB, di Kecamatan Salahutu terdapat 14.409 ha atau 98,94% wilayah yang dapat dibangun, yang artinya masih tersedia ruang yang besar untuk dilakukan berbagai macam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan masyarakat. Yang terakhir terkait kelayakan calon Ibu Kota DOB yang dikaji dengan kepadatan penduduk, didapatkan hasil Negeri Tulehu yang menjadi prioritas karena tingkat kepadatan penduduknya yang paling tinggi yakni 10,44 jiwa/ha.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Alfons, S. S., Soplanit, M., Bakarbessy, A. D., (2024). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berciri Kepulauan (Kajian Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro* Volume 6 Nomor 1.
- Botanri, A. A. A., Makatita, R., Sopacua, V. (2021). Rencana Sarana Pengolahan Limbah B3 Covid-19 di Kota Ambon. *Jurnal Tata Loka Universitas Diponegoro* Volume 23 Nomor 1.
- Hasyim, A., Dharmawan, A. H., Juanda, B. (2010). Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara: Studi Kasus Konflik Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara tentang Enam Desa. *Jurnal Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor* Volume 4 Nomor 1.
- Kurniati, A. C., Suharso, T. W. Surjono. (2010). Kajian Disparitas Sebagai Solusi dalam Penentuan Pemilihan Kecamatan Baru Kota Pasuruan. *Jurnal Tata Kota dan Daerah Universitas Brawijaya* Volume 2 Nomor 2.
- Pakaya, E. (2018). Kelayakan Gorontalo Barat Menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung
- Teras Maluku. (2021). <https://terasmaluku.com/headline/2021/11/11/dprd-ambon-dukungan-pemekaran-jazirah-salahutu/>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah